

**PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN  
MODAL INTELEKTUAL (Studi pada Perusahaan  
Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2010)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**AYU ERIKA FITRIANI**  
**NIM. C2C008023**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

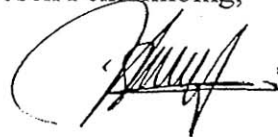
Nama Penyusun : Ayu Erika Fitriani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008023  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR  
CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP PENGUNGKAPAN  
MODAL INTELEKTUAL (Studi  
pada Perusahaan Keuangan yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2010)**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Agus Purwanto, M.Si, Akt.

Semarang, 26 Januari 2012

Dosen Pembimbing,



(Dr.H.Agus Purwanto,M.Si,Akt.)

NIP. 19680827 199202 1001



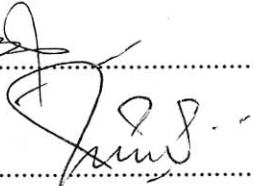
## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Ayu Erika Fitriani  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008023  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR  
CORPORATE GOVERNANCE  
TERHADAP PENGUNGKAPAN  
MODAL INTELEKTUAL (Studi  
pada Perusahaan Keuangan yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
Tahun 2010)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Februari 2012

Tim Penguji

1. Dr.H.Agus Purwanto,M.Si,Akt. (.....)
2. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ayu Erika Fitriani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (Studi Pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkai kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Januari 2012  
Yang membuat pernyataan,

(Ayu Erika Fitriani)  
NIM: C2C008023

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the corporate governance structure that influencing the disclosure of intellectual capital at the financial companies listed on the Stock Exchange in 2010. The Corporate governance structures that was used in this research are board of commissioners size, number of board of commissioners meetings, audit committee size, number of audit committee meetings, and concentrated ownership which are independent variables. Firm size, leverage, and profitability are control variables. The disclosure of intellectual capital is the dependent variable.*

*The population of this research are all financial companies listed on the Stock Exchange in 2010. Total research sample are 60 financial firms that selected with purposive sampling. This research analyzes the company's annual report using the method of content analysis. Data analyzed with test of classical assumptions, test of hypothesis, and multiple linear regression analysis method.*

*The results of this research indicate that the size of the board of commissioners have significant effect to the disclosures of intellectual capital. Number of board of commissioners meetings, audit committee size, number of audit committee meetings and concentrated ownership have no significant effect to the disclosure of intellectual capital.*

*Keywords :* Corporate governance, disclosure of intellectual capital, board of commissioners size, the number of board of commissioners meetings, audit committee size, number of audit committee meetings, concentrated ownership.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur *corporate governance* yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual pada perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010. Struktur *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan konsentrasi kepemilikan saham yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, serta pengungkapan modal intelektual sebagai variabel dependen.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010. Total sampel penelitian adalah 60 perusahaan keuangan yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan dengan menggunakan metode *content analysis*. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan metode analisis regresi berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan konsentrasi kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Kata kunci : *Corporate Governance*, pengungkapan modal intelektual, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, konsentrasi kepemilikan saham.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (Studi pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010).”** Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan, dan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Mochammad Chabachib, M.Si, Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Dr. H. Agus Purwanto, M.Si, Akt. selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran, memberikan arahan, nasihat, saran, serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Etna Nur Afri Yuyetta S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali yang selalu memberikan masukan dan bimbingan.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberi doa, pendidikan, nasihat, dan motivasi yang tak pernah terputus yang menjadi pelita semangat dalam setiap langkah penulis.

5. Adik tersayang, Aghfi, Jessica, dan Putri. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi kalian.
6. Keluarga JL. Mugas Dalam, Eyang Kakung, Om April, Tante Novi, Tante Atik, Putri, Tante Susi, Om Budi, Om Bambang. Terima kasih atas doa, bantuan, semangat, dan motivasi yang kalian berikan.
7. Erwin Kharisma yang selalu memberiku semangat, motivasi, doa, perhatian, dan menemaniku saat susah dan senang serta tempatku meluapkan keluh kesah.
8. Seluruh staf pengajar, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa.
10. Desti Destong, Viki-Kong, Pipit, Pnap, Enggal (Camio-mio), Rina, dan semuanya teman seperjuangan masa sekolah mencapai impian bersama untuk bisa menempuh pendidikan di bangku kuliah, semoga kita dapat sukses dunia akhirat.
11. Arum Jep'ara, Myu Myu A em, Windy Blezinsky, Anita, Rani, Tantri, yang memberi banyak inspirasi dan motivasi dalam hidupku, semoga kita dapat sukses dunia akhirat.



12. Teman-teman seperjuangan dan satu bimbingan, Arum, Fajar, Mbak Ocha, Dita, Mira, Aneg yang bisa menjadi tempat untuk berdiskusi, komunikasi, dan saling mendukung tentang masalah skripsi kita.
13. Seluruh teman-teman Akuntansi 2008. Terima kasih atas warna-warni kehidupan dan kebersamaannya bersama kalian. Mari kita berjuang dan jangan pernah menyerah. Semoga kita dapat sukses dunia akhirat.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semarang, 26 Januari 2012

Penulis

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

*“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila kamu telah selesai(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-  
sungguh (urusan) yang lain.” (QS. Al-Insyirah: 5-7)*

*“Maka ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu, dan  
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.” (QS. Al-  
Baqarah: 152)*

*“Berdoalah kepada-Ku , niscaya akan Kuperkenankan bagimu ...” (QS. Al-  
Mu'min: 60)*

*“Keraslah kamu terhadap kehidupan, maka kehidupan akan lunak kepadamu”*

### **Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

*Bapakku Eko Suryono dan Ibuku tercinta Rosita, Adikku Mustagfirin Haris Prayogo  
tersayang beserta keluargaku tersayang*

*Kekasihku tersayang, Erwin Kharisma*

*Sahabat dan teman-temanku tersayang*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
<b>Bab II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan teori.....	14
2.1.1 Teori Agensi.....	14
2.1.2 Modal Intelektual.....	17
2.1.3 Pengungkapan Modal Intelektual.....	21
2.1.4 <i>Corporate Governance</i> .....	23
2.1.4.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	23
2.1.4.2 Ukuran Dewan Komisaris.....	26
2.1.4.3 Jumlah Rapat Dewan Komisaris.....	28
2.1.4.4 Ukuran Komite Audit.....	28
2.1.4.5 Jumlah Rapat Komite Audit.....	30
2.1.4.6 Konsentrasi Kepemilikan Saham.....	30
2.1.5 Ukuran Perusahaan.....	31
2.1.6 Leverage Perusahaan.....	31
2.1.7 Profitabilitas Perusahaan.....	32
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
2.4 Hipotesis.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	46
3.1.1 Variabel Terikat (Dependen).....	46
3.1.2 Variabel Bebas (Independen).....	49
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	49
3.1.2.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris.....	49

3.1.2.3 Ukuran Komite Audit .....	50
3.1.2.4 Jumlah Rapat Komite Audit .....	50
3.1.2.5 Konsentrasi kepemilikan Saham.....	50
3.1.3 Variabel Kontrol .....	50
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan .....	51
3.1.3.2 <i>Leverage</i> Perusahaan .....	51
3.1.3.3 Profitabilitas Perusahaan .....	51
3.2 Populasi dan Sampel.....	52
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.5 Metode Analisis Data.....	54
3.5.1 Analisis Deskriptif .....	54
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif .....	54
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	54
3.5.3.1 Uji Normalitas.....	55
3.5.3.2 Uji Multikolinieritas .....	55
3.5.3.3 Uji Heteroskedestisitas .....	56
3.5.4 Analisis Regresi Berganda.....	56
3.5.5 Pengujian Hipotesis .....	57
3.5.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	57
3.5.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	58
3.5.5.3 Uji t (Uji Parsial).....	58
<b>BAB IV HASIL DAN ANALISIS</b>	
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	60
4.2 Analisis Data .....	61
4.2.1 Analisis Deskriptif Pengungkapan Modal Intelektual.....	61
4.2.2 Statistik Deskriptif .....	70
4.2.3 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	74
4.2.3.1 Uji Normalitas.....	74
4.2.3.2 Uji Multikolinearitas .....	76
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas .....	77
4.2.4 Hasil Analisis Regresi Berganda .....	78
4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis.....	80
4.2.5.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	80
4.2.5.2 Hasil Uji Signifikan Simultan (F test) .....	81
4.2.5.3 Hasil Uji t (Uji Parsial) .....	81
4.3 Interpretasi .....	84
4.3.1 Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) .....	84
4.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris (UKOM) terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) .....	86
4.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris (RAKOM) terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) .....	87
4.3.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit (UDIT)	

terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) .....	87
4.3.5 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit (RADIT) terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) .....	89
4.3.6 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Saham (KONST) terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (ICD) .....	90
4.3.7 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (ICD).....	91
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Keterbatasan .....	94
5.3 Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	100

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komponen Modal Intelektual .....	20
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3.1 Indeks Pengungkapan Modal Intelektual .....	47
Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian .....	60
Tabel 4.2 Klasifikasi Sampel Penelitian .....	61
Tabel 4.3 Pengungkapan Modal Intelektual Perusahaan Keuangan .....	61
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif .....	70
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	76
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas .....	77
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	79
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	80
Tabel 4.9 Hasil Uji F test .....	81
Tabel 4.10 Hasil Uji t .....	82

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur <i>Bod</i> dan <i>Boc</i> dalam <i>Two Tier System</i> yang berkembang di Indonesia .....	27
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Grafik Histogram .....	75
Gambar 4.2 Grafik <i>Normal PP-Plot of Regression Standardized Residual</i> .....	76
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas ( <i>Scatterplot</i> ).....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	100
LAMPIRAN B Daftar Indeks Pengungkapan Modal Intelektual menurut Bukh, <i>et. al</i> (2005) .....	102
LAMPIRAN C Daftar Pengungkapan Modal Intelektual Perusahaan Sampel Penelitian .....	105
LAMPIRAN D Perhitungan Variabel Penelitian .....	117
LAMPIRAN E Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 17.0 .....	119



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi ini, perusahaan semakin dihadapi dengan pesatnya perkembangan dan perubahan pengetahuan serta teknologi. Kondisi tersebut menjadi suatu tantangan maupun ancaman bagi persaingan serta eksistensi perusahaan. Menurut Kuryanto (2008) kini terjadi fenomena yang terjadi pada masyarakat yang ditandai dengan pergeseran tipe masyarakat industrialis atau jasa ke tipe masyarakat pengetahuan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mencari strategi yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah tersebut.

Strategi konvensional berupa perhatian perusahaan terhadap aset fisik yang diungkapkan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan secara layak. Aset fisik dirasa tidak mampu memberi nilai lebih bagi perusahaan apabila tanpa pengelolaan yang baik dan tepat oleh sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, perhatian terhadap aset fisik tidak dapat digunakan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan dan perubahan pengetahuan serta teknologi yang semakin pesat.

Menurut Kuryanto (2008) perusahaan kini harus merubah strategi bisnisnya dari bisnis berdasarkan tenaga kerja (*labor based business*) ke bisnis berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*). Perusahaan yang berbasis pengetahuan menerapkan konsep manajemen pengetahuan yang bertugas mencari informasi

mengenai bagaimana cara memilih, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya agar efisien. Perhatian khusus perusahaan terhadap modal intelektual menjadi solusi tepat untuk menjawab masalah tersebut. Modal intelektual didefinisikan sebagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses, atau teknologi yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan (Bukh, *et al.*, 2005).

Peran strategis modal intelektual yaitu sebagai suatu potensi perusahaan untuk meningkatkan keunggulan daya saing yang belum tentu dimiliki oleh perusahaan lainnya ataupun sulit untuk ditiru oleh perusahaan pesaing lainnya. Sumber daya intelektual dengan segala pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya mampu mengantisipasi dan menyesuaikan segala bentuk ketidakpastian situasi yang dapat mengancam eksistensi perusahaan. Kondisi tersebut dapat bermanfaat untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui penciptaan laba, *strategic positioning* (pangsa pasar, kepemimpinan, dan reputasi), inovasi teknologi, loyalitas pelanggan, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas (Wahyu, 2009).

Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan disajikan dalam laporan tahunan. Hal tersebut didukung regulasi di Indonesia yaitu Bapepam Kep 134/BL/2006 yang menyatakan kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan laporan tahunan. Selain itu munculnya PSAK no. 19 (revisi 2009) yang mengatur tentang aset tidak berwujud. Akan tetapi, informasi mengenai item modal intelektual tidak diatur dalam regulasi tersebut. Dengan demikian, pengungkapan informasi modal intelektual merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela. Menurut Bruggen, *et al.* (2009)

standar sukarela lebih tepat dan fleksibel dibandingkan dengan standar wajib karena adanya perubahan yang cepat pada modal intelektual.

Praktik dan pengungkapan informasi modal intelektual merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *Good Corporate Governance* yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder* dengan menjalin kerja sama yang aktif sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, perusahaan memperoleh manfaat yaitu dapat menjaga dan memelihara kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan.

*Corporate Governance* meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Struktur dan mekanisme dalam *Corporate Governance* dapat digunakan untuk memonitoring tindakan manajemen perusahaan yang curang. Perusahaan yang menerapkan asas *good corporate governance* dalam kegiatan bisnisnya akan lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang tidak hanya sekedar mematuhi peraturan atau undang-undang yang ada, tetapi juga informasi yang material dan relevan untuk kepentingan *stakeholder*. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan oleh *stakeholder* yaitu informasi mengenai modal intelektual. *Stakeholder* membutuhkan informasi bagaimana penguasaan pengetahuan atau teknologi yang dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Konsep *corporate governance* dilatar belakangi oleh adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan di dalam perusahaan, yang selanjutnya dimodelkan

dalam *Agency Theory* (Waryanto, 2010). Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan akan menimbulkan suatu masalah agensi yaitu konflik kepentingan. Konflik kepentingan antara agen dengan prinsipal terjadi karena pihak agen tidak berindak sesuai dengan keinginan pihak prinsipal sehingga akan menimbulkan biaya agensi.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bukh, *et al.* (2005). Penelitian ini menggunakan struktur *corporate governance* secara khusus dalam mempengaruhi pengungkapan modal intelektual pada perusahaan keuangan di Indonesia yang terdaftar di BEI. Struktur *corporate governance* yang diteliti dalam penelitian ini meliputi ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan konsentrasi kepemilikan saham. Sedangkan, penelitian Bukh, *et al.* (2005) hanya menggunakan kepemilikan manajerial sebagai karakteristik *corporate governance*, ukuran perusahaan, perbedaan industri, dan umur perusahaan yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual di Denmark. Karakteristik ukuran perusahaan pada penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol.

Penelitian ini lebih menekankan struktur *corporate governance* sebagai variabel independen karena terdapat beberapa pertimbangan. Variabel dewan komisaris digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi ukuran dewan komisaris serta jumlah rapat dewan komisaris. Variabel tersebut sesuai dengan kondisi di Indonesia, yaitu perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan sistem Dua Tingkat atau *Two*

*Board System* yaitu sistem yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dengan fungsi pengawasan (komisaris).

Pada variabel ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit dilakukan dalam penelitian ini karena di Indonesia terdapat peraturan Bapepam Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit. Dengan demikian, ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan bagaimana pengaruhnya terhadap pengungkapan modal intelektual.

Pada variabel konsentrasi kepemilikan saham diadopsi pada penelitian ini karena perusahaan di Indonesia lebih banyak memiliki jumlah pemegang saham tertinggi yang berada di luar perusahaan. Pemegang saham yang meliputi kepemilikan saham manajerial, institusional, negara, dan asing masing-masing memiliki proporsi saham tertentu yang menentukan dominan mereka dalam memiliki saham atau kekayaan sehingga akan mempengaruhi konsentrasi kepemilikan saham terbesar di suatu perusahaan.

Pada variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan digunakan dalam melakukan penelitian ini karena menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Dengan adanya pencatatan perusahaan di Bursa Efek Indonesia mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut besar dan akan menjadi sorotan publik serta adanya jumlah pemegang saham yang besar yang memberi tekanan kepada perusahaan untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan prinsipal yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, pada variabel *leverage* dan profitabilitas digunakan dalam penelitian ini karena sebagai

salah satu indikator kinerja perusahaan yang berkaitan dengan kondisi keuangan yang dapat menjadi suatu pertimbangan dalam pengungkapan modal intelektual.

Banyak terjadi hasil yang tidak konsisten yang dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Bruggen, *et al.* (2009) menemukan hubungan positif antara jenis industri dengan pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Branco, *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa jenis industri tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh White, *et al.* (2007) dan Artinawati (2009) menemukan hubungan positif yang terjadi antara *leverage* perusahaan dengan pengungkapan modal intelektual. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2009) dan Woodcock dan Rosalind (2009) yang menemukan bahwa faktor *leverage* perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh White, *et al.* (2007) dan Branco, *et al.* (2010) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Bukh, *et al.* (2005) dan Fakhilatun, *et al.* (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh White, *et al.* (2007) dan Sani (2010) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh

Chandra (2010) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian ini memilih konteks di Indonesia karena terdapat pertimbangan berbagai hal. Adanya undang-undang yang mengatur tentang struktur dan organ perseroan terbatas maupun tata kelola perusahaan dalam UU No. 40 tahun 2007. Selain itu adanya peraturan Bapepam Kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Perusahaan wajib menyampaikan laporan tahunan yang diantaranya menguraikan secara singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan oleh perusahaan. Perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, maka akan lebih banyak memberikan informasi dan dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi.

Selain itu, wacana yang sering dihadapi mengenai modal intelektual yaitu bagaimana cara pengukuran dan penyajian modal intelektual. Di Indonesia terdapat regulasi yaitu PSAK No.19 (revisi 2009) yang mengatur aset tidak berwujud. Menurut PSAK No.19 (revisi 2009) aset tidak berwujud merupakan aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Akan tetapi, dalam regulasi tersebut tidak mengatur bagaimana cara pengukuran dan item-item modal intelektual apa saja yang perlu diungkapkan. Konservatisme akuntansi untuk aset tidak berwujud memberikan sedikit kesempatan regulator dalam mengembangkan standar untuk modal intelektual (Brenan dan Connel, 2000). Menurut Bruggen, *et al.* (2009) kerangka kerja akuntansi dan standar akuntansi tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran dan

pengungkapan penuh komponen modal intelektual. Kondisi tersebut menjadi perhatian dan tantangan bagi para akuntan untuk mencari informasi mengenai bagaimana cara mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan modal intelektual (Kuryanto, 2008).

Sektor perusahaan keuangan dianggap sebagai objek ideal dalam penelitian ini. Perusahaan keuangan lebih banyak menggunakan sumber daya intelektualnya dibandingkan sektor perusahaan lainnya. Keberhasilan perusahaan keuangan dalam memberi jasa atau layanan keuangan kepada pelanggannya sangat bergantung pada kecerdasan intelektual sumber daya yang dimiliki perusahaan.

Kegiatan bisnis dalam perusahaan keuangan yang mengelola dana dalam jumlah besar akan menimbulkan potensi seseorang untuk melakukan kecurangan. Kasus yang menimpa *senior relation manager* Citi Bank pada tahun 2011 terbukti membobol rekening nasabahnya hingga Rp 17M. Kemudian perusahaan keuangan merupakan perusahaan yang berbasis pengetahuan dan menggunakan teknologi ternyata rawan tindakan kecurangan, contohnya seperti kasus pembobolan situs web Bank Central Asia dan Bank Lippo pada tahun 2000. Menurut Robiyanto (2009) kasus tersebut merupakan kegagalan pengendalian resiko dalam penggunaan teknologi informasi.

Mekanisme yang ada dalam struktur *corporate governance* dapat digunakan sebagai tindakan monitoring sehingga dapat mencegah kecurangan. Penggunaan pengetahuan dan teknologi yang melekat pada operasi perusahaan keuangan dapat dimanfaatkan oleh dewan komisaris serta komite audit untuk melakukan pengendalian internal sehingga dapat mendeteksi *fraud*. Kemudian dengan diterapkannya struktur



*corporate governance* secara baik, maka akan mendorong perusahaan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *stakeholder*, salah satunya untuk bertindak dalam melakukan pengungkapan informasi modal intelektual. Perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual dapat membantu perusahaan dalam menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme dalam struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual (Studi pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Apakah struktur *Corporate Governance* berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010?”. Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka akan dijabarkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan modal intelektual?

2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan modal intelektual?
3. Apakah ukuran komite audit mempengaruhi pengungkapan modal intelektual?
4. Apakah jumlah rapat komite audit mempengaruhi pengungkapan modal intelektual?
5. Apakah konsentrasi kepemilikan saham mempengaruhi pengungkapan modal intelektual?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan penelitian ini secara umum untuk memverifikasikan teori yang akan digunakan yaitu teori agensi untuk menjelaskan mekanisme struktur corporate governance dalam mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh struktur corporate governance yang meliputi ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan konsentrasi kepemilikan saham terhadap pengungkapan modal intelektual. Tujuan secara khusus akan dijabarkan sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan modal intelektual

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual
5. Untuk menganalisis pengaruh konsentrasi kepemilikan saham terhadap pengungkapan modal intelektual

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak yaitu:

1. Memberikan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan yang berkaitan dengan modal intelektual, terutama mengenai pengaruh struktur corporate governance terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
2. Memberikan referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.
3. Memberikan kontribusi praktis bagi pihak perusahaan ataupun manajemen untuk memahami konsep mengenai faktor pengungkapan modal intelektual dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.
4. Memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan seperti investor dan sebagainya dalam melakukan investasi secara tepat sehingga dapat menghindari kerugian.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi bab Pendahuluan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Hasil dan Analisis, dan Penutup. Bab-bab dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### **2. Bab II : Telaah Pustaka**

Bab ini menjelaskan landasan teori dan pembahasan hasil penelitian terdahulu yang sejenis, kemudian akan dikembangkan melalui kerangka pemikiran, dan hipotesis yang akan dibuat.

### **3. Bab III : Metode Penelitian**

Pada bab ini berisi deskripsi mengenai bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Bab ini menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional, menjelaskan populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis penelitian.

### **4. Bab IV: Hasil dan Analisis**

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis data yaitu analisis kuantitatif yang akan digunakan dalam penelitian ini, kemudian melakukan interpretasi hasil.

5. Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang dilakukan dalam penelitian. Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Pada penelitian ini akan menguji struktur *corporate governance* yang dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Untuk memahami bagaimana mekanisme struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual, maka akan digunakan teori agensi sebagai landasan pemikiran dalam penelitian ini.

Teori agensi menjelaskan adanya hubungan keagenan atau kontrak kerja yang melibatkan antara dua pihak. Kontrak kerja terjalin antara pihak prinsipal dengan pihak agen. Wahyu (2009) menyatakan bahwa kontrak kerja merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik berupa keuntungan maupun risiko yang telah disetujui agen dengan prinsipal.

Potensi masalah yang muncul dalam teori agensi yaitu adanya asimetri informasi. Pihak agen perusahaan tentu lebih memahami kondisi internal suatu perusahaan dibandingkan dengan pihak prinsipal. Kondisi tersebut akan memicu potensi kecurangan pihak agen untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan yaitu menyajikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Sedangkan, pihak prinsipal memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi secara rinci karena tidak memahami kondisi internal perusahaan. Untuk memperoleh informasi, pihak prinsipal hanya

terbatas pada laporan tahunan perusahaan yang disajikan. Dengan demikian, hal tersebut dapat merugikan investor karena memperoleh informasi yang tidak relevan dan akurat.

Menurut Bruggen, *et al.* (2009) menyatakan bahwa asimetri informasi dapat mengakibatkan misalokasi modal yang mengarah pada biaya sosial seperti pengangguran dan penurunan produktivitas. Kondisi mengenai potensi kecurangan pihak agen tersebut didukung oleh Eisenhard (1989) yang menyatakan bahwa terdapat tiga asumsi dasar yang melandasi teori agensi yaitu sebagai berikut:

1. Asumsi tentang sifat manusia

Sifat manusia yang mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), kemudian manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

2. Asumsi tentang keorganisasian

Dalam suatu organisasi terdapat konflik antar anggota organisasi dan efisiensi sebagai kriteria produktivitas, serta asimetri informasi antara pihak agen dengan prinsipal.

3. Asumsi tentang informasi

Informasi dipandang oleh perusahaan sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan informasinya.

Teori agensi dapat digunakan untuk mengurangi adanya konflik kepentingan dengan melakukan mekanisme pengawasan pada struktur *corporate governance*

sehingga dapat menyelaraskan kepentingan. Mekanisme pengawasan *corporate governance* dilakukan perusahaan keuangan untuk menciptakan iklim pengendalian dan disiplin yang baik sehingga penyimpangan maupun tindakan *fraud* dapat dicegah.

Perusahaan keuangan begitu kompleks dan berkaitan dalam pengelolaan dana dalam jumlah yang sangat besar sehingga memicu potensi kecurangan yang dilakukan oleh manajer, ataupun karyawan perusahaan. Kecurangan yang terjadi meliputi pengaburan transaksi, pencatatan tidak benar terhadap slip transfer penarikan dana nasabah, pembobolan rekening nasabah, pembobolan situs web, dan sebagainya.

Modal intelektual yang melekat pada perusahaan keuangan dapat dimanfaatkan dewan komisaris dan komite auditnya untuk melakukan pengendalian dengan menggunakan sumber daya intelektual berupa SDM, pengetahuan dan teknologi. Dengan sumber daya manusia yang kompeten dan independen didukung dengan teknologi yang dapat mendeteksi *fraud*, misalnya pada teknologi pendeteksi *fraud* pada kartu kredit dan debit dapat meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi.

Struktur dalam *corporate governance* memonitoring perusahaan keuangan agar bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, yaitu dalam melakukan pengungkapan informasi salah satunya informasi modal intelektual. Dengan melakukan pengungkapan informasi modal intelektual maka akan memenuhi kebutuhan informasi pemangku kepentingan mengenai bagaimana perusahaan keuangan menggunakan modal intelektualnya dalam mengelola bisnisnya dengan baik dan meminimumkan potensi kecurangan yang ada sehingga tercapai transparansi serta akuntabilitas. Keuntungan yang diperoleh dari pemangku kepentingan yaitu mendapatkan informasi



yang relevan, sedangkan pada perusahaan dapat menjalin hubungan bisnis yang baik dengan pemangku kepentingan sehingga dapat membantu menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Dengan melakukan mekanisme pengawasan, maka dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Selain itu, dengan menerapkan mekanisme pengawasan pada struktur *corporate governance* diharapkan dapat menurunkan tingkat asimetri informasi yang memberi keuntungan perusahaan seperti penurunan biaya modal, penurunan biaya pinjaman, peningkatan penilaian dan keyakinan kekayaan masa depan perusahaan.

### **2.1.2 Modal Intelektual**

Kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan modal intelektual menjadi solusi tepat dalam persaingan global. Dengan modal intelektual, perusahaan dapat menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan daya saing global, kinerja, dan nilai perusahaan.

Meskipun penting, modal intelektual merupakan sesuatu yang kompleks dan sulit untuk didefinisikan. Hal tersebut terbukti dalam berbagai definisi yang berbeda dari berbagai literatur yang ada. Menurut Sujana dan Abeysekara (dalam Branco, *et al.* 2010) bahwa modal intelektual merupakan bagian dari aset tidak berwujud. Hunter, *et al.* (dalam Woodcock dan Rosalind, 2009) menjelaskan bahwa modal intelektual adalah perbedaan antara nilai pasar dengan nilai buku perusahaan. Sedangkan, menurut Pablos (dalam Branco, *et al.* 2010) modal intelektual sebagai sumber daya

berbasis pengetahuan yang membantu menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan demikian, modal intelektual dapat didefinisikan yaitu semua proses berdasarkan aset tidak berwujud berbasis sumber daya pengetahuan yang biasanya tidak ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Modal intelektual terdiri dari beberapa komponen-komponen yang dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk menerapkan strateginya. Dengan memahami komponen-komponen modal intelektual, diharapkan dapat membantu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing (Wahyu, 2009). Guthrie, *et al.* (dalam Woodcock dan Rosalind, 2009) menyatakan bahwa komponen modal intelektual terdiri dari tiga elemen utama, yaitu modal internal, modal eksternal, dan modal manusia. Komponen modal intelektual akan dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

### **1. Modal Internal (*internal capital*)**

Modal Internal merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menjalankan rutinitas kinerja yang didukung dengan operasi dan struktur yang berkaitan juga dengan usaha karyawan untuk menciptakan kinerja intelektual perusahaan yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Modal internal mengacu pada kekayaan intelektual dan infrastruktur perusahaan. Kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak paten, merek dagang, dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur perusahaan mencakup nilai, sistem, proses, filosofi manajemen, kultur perusahaan dan sebagainya. Kinerja perusahaan yang optimal tidak akan

tercipta apabila sumber daya manusia intelektualnya tidak didukung oleh modal internal perusahaan yang baik, misalnya sistem operasi dan prosedur perusahaan yang buruk.

## 2. **Modal Eksternal (*eksternal capital*)**

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai nyata bagi perusahaan. Modal eksternal menjelaskan mengenai hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Hubungan tersebut dapat juga dinyatakan dengan *relational capital*. Modal eksternal meliputi merek, pelanggan, kepuasan pelanggan, nama atau reputasi perusahaan, saluran distribusi, kerjasama bisnis, dan sebagainya.

## 3. **Modal Manusia (*human capital*)**

Modal manusia merupakan kemampuan perusahaan secara kolektif untuk menghasilkan solusi yang terbaik berdasarkan penguasaan pengetahuan dan teknologi dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Melalui daya pikir serta kontribusi sumber daya manusia yang intelektual inilah tercipta sumber inovasi dan kemajuan suatu perusahaan. Akan tetapi, modal manusia merupakan komponen modal intelektual yang sulit diukur. Modal manusia meliputi karyawan, pendidikan, pelatihan, kompetensi, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya.

Untuk lebih memahami komponen modal intelektual, maka akan disajikan tabel 2.1 yang menjelaskan ketiga komponen modal intelektual tersebut. Tabel yang disajikan ini menurut Guthrie, *et al.* (dalam Woodcock dan Rosalind, 2009)

merupakan kerangka modal intelektual yang digunakan untuk melakukan pengkodean dalam studi analisisnya.

**Tabel 2.1**  
**Komponen Modal Intelektual**

No	Modal Internal	Modal Eksternal	Modal Manusia
1	Kekayaan intelektual	Merek	Karyawan
2	Filosofi manajemen	Pelanggan	Pendidikan
3	Kultur perusahaan	Kepuasan pelanggan	Pelatihan
4	Proses manajemen	Nama/reputasi	<i>Work-related</i>
5	Informasi/ <i>Networking</i>	Saluran distribusi	<i>Entrepreneurial spirit</i>
6	Hubungan keuangan	Kerjasama bisnis	
7		<i>Licensing agreements</i>	

Sumber : Guthrie, *et al.* (dalam Woodcock dan Rosalind, 2009)

Ketiga komponen modal intelektual tersebut sangat berkaitan. Perusahaan perlu memberi perhatian terhadap ketiga komponen modal intelektual tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Perusahaan tidak akan mencapai kinerja intelektualnya yang optimal apabila sumber daya intelektualnya tidak didukung dengan sistem dan operasi perusahaan yang baik. Interaksi antara *human capital* dan *internal capital* yang baik maka akan menciptakan *eksternal capital* yang sukses. Perusahaan memperhatikan lingkungan eksternal sekitarnya. Dengan menjalin hubungan kerjasama yang baik, maka akan meningkatkan kerjasama bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

### 2.1.3 Pengungkapan Modal Intelektual

Menurut Bruggen, *et al.* (2009) alasan perusahaan mengungkapkan modal intelektual yaitu mengurangi tingkat asimetri informasi sehingga biaya modal perusahaan dapat mengalami penurunan. Pengungkapan modal intelektual dapat meningkatkan nilai relevansi laporan keuangan. Peningkatan nilai relevansi laporan keuangan dapat mencegah perusahaan pada kondisi sebagai berikut:

1. Kegagalan dalam menyampaikan informasi secara relevan sehingga mengakibatkan kemerosotan posisi keuangan perusahaan dan dapat menghilangkan daya saing jangka panjang.
2. Investor sulit menilai secara akurat nilai perusahaan untuk alokasi sumber daya dengan menggunakan laporan keuangan yang tidak melaporkan modal intelektual.
3. Manajer sulit untuk menentukan relevansi aset tidak berwujud yang diperlukan untuk operasi perusahaan.

Pengungkapan modal intelektual dapat menciptakan kepercayaan dengan karyawan dan *stakeholder*, serta mencegah kerugian dan rumor gosip yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Kepercayaan penting dalam jangka panjang bagi perusahaan sebagai suatu strategi dalam menciptakan komitmen *stakeholder* yang lebih tinggi untuk masa depan perusahaan (Bruggen, *et al.*, 2009). Pengungkapan informasi mengenai modal intelektual dapat juga dijadikan perusahaan sebagai alat pemasaran. Dengan pengungkapan modal intelektual, perusahaan dapat memberikan bukti tentang nilai-nilai sejati mereka yang diterapkan dalam perusahaan serta

kemampuan perusahaan dalam menciptakan kekayaan sehingga dapat meningkatkan reputasi.

Pengelolaan modal intelektual perlu diberi perhatian secara lebih. Pengelolaan modal intelektual yang baik akan dapat membantu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan modal intelektual. Akan tetapi sesuai dengan perkembangan jaman, maka terjadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal penyajian dan penilaian aset tak berwujud terutama modal intelektual. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bruggen, *et al.* (2009) yang menjelaskan standar sukarela lebih tepat dan fleksibel dibandingkan dengan standar wajib karena adanya perubahan yang cepat pada modal intelektual. Menurut Brenan dan Connel (2000) konservatisme akuntansi untuk aset tidak berwujud memberikan sedikit kesempatan pada regulator dalam mengembangkan standar untuk modal intelektual.

Di Indonesia, pengungkapan modal intelektual masih bersifat *voluntary*. Sampai saat ini belum ada pengelompokan komponen modal intelektual yang dapat diterima bersama dan belum ada pola khusus pengungkapan modal intelektual (Yunanto, 2010). Namun demikian, terdapat perkembangan konsep modal intelektual di Indonesia dengan adanya regulasi yaitu PSAK No.19 (revisi 2009) tentang aset tak berwujud. Menurut PSAK No. 19 aset tak berwujud merupakan aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik, dimiliki dan dibawah kontrol suatu perusahaan, dapat dijual, disewakan, dan dipertukarkan kepada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif.

Pengungkapan modal intelektual tidak disajikan dalam neraca. Hal tersebut disebabkan pengungkapan modal intelektual sulit untuk diukur dan dikuantifikasikan. Menurut Bruggen, *et al.* (2009) kerangka kerja akuntansi dan standar akuntansi yang berlaku tidak memungkinkan untuk melakukan pengakuan dan pengungkapan penuh pada komponen modal intelektual. Oleh karena itu, metode pengukuran baru dan model pelaporan IC seperti *IC Index* dapat membantu mengatasi masalah standar akuntansi keuangan tradisional dalam pengukuran modal intelektual.

Pengungkapan modal intelektual dituangkan dalam informasi tambahan melalui laporan tahunan yang dipublikasikan. Dengan melakukan pengungkapan modal intelektual, perusahaan dapat mengatasi masalah yang ada dalam hubungan keagenan seperti asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa biaya agen timbul dari perilaku oportunistik manajernya, sehingga mereka termotivasi untuk mengungkapkan informasi secara sukarela yaitu informasi modal intelektual untuk mengurangi biaya agensi tersebut.

#### **2.1.4 Corporate Governance**

##### **2.1.4.1 Pengertian Corporate Governance**

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (dalam Hastuti, 2011), *corporate governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Sedangkan, menurut Komite Cadbury (dalam Hardikasari, 2011), *corporate governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholder*.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep 117/M-MBU/2002, *corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya serta berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Pengertian dan konsep *corporate governance* ini dilandasi dengan teori agensi. Menurut Solihin (dalam Waryanto, 2010), pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme pengawasan tersebut, maka diharapkan dapat meminimalkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh agen sehingga dapat mencegah kerugian di antara kedua belah pihak.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, prinsip-prinsip tersebut meliputi lima aspek, yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah adanya pengungkapan informasi yang bersifat terbuka, jelas, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut



tentang keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, akuntabilitas diperlukan perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang

saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mewujudkan terciptanya *corporate governance* yang baik, prinsip-prinsip tersebut harus dicapai dengan kerjasama yang baik dengan pihak di dalam maupun di luar perusahaan. RUPS atau pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, dan karyawan merupakan organ-organ kunci dalam mewujudkan pelaksanaan *corporate governance* yang baik (Waryanto, 2010).

#### **2.1.4.2 Ukuran Dewan Komisaris**

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direktur atau direksi. Di Indonesia, dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dijabarkan mengenai fungsi wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada pasal 108 ayat (5) perusahaan perseroan terbatas wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota dewan komisaris. Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKG, 2006), jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

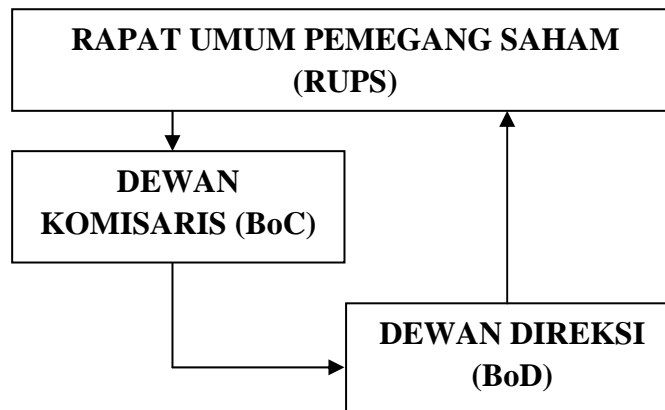
Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKG, 2006), agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Indonesia menganut sistem Dua Tingkat (*Two Tier System*) dalam menentukan fungsi dewan komisaris. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh dewan direksi agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan pemangku kepentingan.

**Gambar 2.1**  
**Struktur *Bod* dan *Boc* dalam *Two Tier System* di Indonesia**



Sumber : FCGI (2002)

Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat mengurangi biaya agensi. Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal yang dapat

digunakan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak agen dengan pihak prinsipal dengan melakukan pengungkapan informasi modal intelektual.

#### **2.1.4.3 Jumlah Rapat Dewan Komisaris**

Menurut Waryanto (2010), rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Proses pengambilan keputusan penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian.

#### **2.1.4.4 Ukuran Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut peraturan BAPEPAM Kep 29/PM/2004 tentang peraturan nomor IX.1.5 menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan 2 (dua) anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.

Menurut KNKG (2006) jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan pengambilan keputusan. Ukuran komite audit harus ditentukan oleh perusahaan. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri agar tepelihara integritas dan pandangan obyektif dalam penyusunan rekomendasi. Dengan demikian, individu yang mandiri akan lebih adil dalam menangani suatu masalah.

Struktur komite audit telah diatur oleh peraturan BAPEPAM Kep 29/PM/2004 tentang peraturan nomor IX.1.5 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit sebagai berikut:

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Dalam pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa :

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
4. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
5. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Kewenangan komite audit sebagai alat bantu dewan komisaris. Komite audit tidak memiliki otoritas apapun dan hanya bertindak sebagai rekomendasi dewan komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang memperoleh hak kuasa eksplisit dari dewan

komisaris. Hak kuasa tersebut yaitu menentukan dan mengevaluasi komposisi auditor eksternal, memimpin suatu investigasi, dan sebagainya.

#### **2.1.4.5 Jumlah Rapat Komite Audit**

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.1.5 menjelaskan bahwa komite audit mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Sedangkan, menurut pernyataan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit dilakukan minimal 2 kali dalam 1 bulan sehingga minimal diperlukan 24 kali pertemuan dalam setahun. Rapat komite audit digunakan sebagai media dalam melakukan koordinasi dengan komite audit untuk melakukan tugas pelaksanaan dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengendalian internal.

#### **2.1.4.6 Konsentrasi Kepemilikan Saham**

Struktur kepemilikan perusahaan terdiri dari struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan asing, dan sebagainya. Jumlah kekayaan atau saham yang dimiliki masing-masing pemilik tentu memiliki proporsi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut akan menunjukkan pemilik saham mana yang memiliki jumlah saham terbesar di antara struktur kepemilikan saham yang lain. Hal ini dapat dikatakan konsentrasi kepemilikan saham.

.Teori agensi telah menjadi landasan pemikiran dalam menjelaskan konsentrasi kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi akan

menyebabkan adanya kekuasaan dan memberikan pengaruh bagi operasi perusahaan. Dengan adanya tekanan dari konsentrasi kepemilikan saham tersebut akan dapat menghindari tindakan pihak agen untuk melakukan kecurangan. Kondisi tersebut merupakan tindakan pengawasan yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya agensi.

#### **2.1.5 Ukuran Perusahaan**

Perusahaan besar akan menimbulkan biaya agensi yang besar. Untuk menekan biaya agensi tersebut, maka perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas. Di samping itu, ukuran perusahaan yang besar tentu memiliki jumlah pemegang saham yang besar. Dengan jumlah pemegang saham yang besar, maka dapat memberikan tekanan kepada manajer untuk mengungkapkan informasi yang akurat dan relevan, serta untuk mengendalikan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajer.

#### **2.1.6 *Leverage* Perusahaan**

Rasio *Leverage* menjelaskan proporsi total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham. *Leverage* menggambarkan kondisi struktur modal perusahaan untuk melihat potensi risiko dari tak tertagihnya suatu hutang. *Leverage* digunakan perusahaan sebagai alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaannya.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara *leverage* dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat suatu potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholder* kepada pemegang saham dan

manajer pada perusahaan yang mempunyai tingkat ketergantungan sangat tinggi, sehingga menimbulkan biaya agensi yang tinggi. Dengan demikian, *leverage* akan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi modal intelektual.

### **2.1.7 Profitabilitas Perusahaan**

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Perhitungan rasio profitabilitas ini bermanfaat untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang dihasilkan dalam satu periode, mengetahui posisi laba tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, dan mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai modal intelektual terus berkembang yang dihubungkan dengan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual. Bukh, *et al.* (2005) menemukan faktor berupa kepemilikan manajerial dan jenis industri berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual di Denmark. Penelitian yang dilakukan White, *et al.* (2007) berhasil menemukan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh Bruggen, *et al.* (2009) berhasil menemukan bahwa faktor jenis industri memainkan peranan penting terhadap pengungkapan modal intelektual. Selain itu, ukuran perusahaan juga merupakan penentu dalam pengungkapan modal intelektual.



Fakhilatun, *et al.* (2009) meneliti dampak *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia. Kepemilikan manajerial merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual, akan tetapi memiliki hubungan negatif dengan modal internal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Artinawati (2009) menemukan bahwa faktor ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan saham, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia. Wahyu (2009) menemukan faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual yaitu ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Woodcock dan Rosalind (2009) menemukan faktor berupa jenis auditor dan tipe auditor yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Penelitian yang dilakukan Branco, *et al.* (2010) berhasil menemukan faktor ukuran perusahaan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual di perusahaan Portugal.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2010) menemukan bahwa struktur kepemilikan berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian yang dilakukan oleh Sani (2010) berhasil menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Banyak terjadi hasil yang tidak konsisten yang dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Bruggen, *et al.* (2009) menemukan hubungan

positif antara jenis industri dengan pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Branco, *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa jenis industri tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh White, *et al.* (2007) dan Artinawati (2009) menemukan hubungan positif yang terjadi antara *leverage* perusahaan dengan pengungkapan modal intelektual. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2009) dan Woodcock dan Rosalind (2009) yang menemukan bahwa faktor *leverage* perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh White, *et al.* (2007) dan Branco, *et al.* (2010) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Bukh, *et al.* (2005) dan Fakhilatun, *et al.* (2009) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh White, *et al.* (2007) dan Sani (2010) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Sedangkan, pada penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2010) menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Berikut ini akan disajikan tabel 2.2 yang menjelaskan mengenai ringkasan penelitian terdahulu

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1	Sani (2010)	Mengetahui pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap pengungkapan modal intelektual	Analisis regresi berganda	<p>a. Independen: komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, komposisi komite audit, frekuensi pertemuan komite audit.</p> <p>b. Variabel kontrol: usia <i>listing</i>, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.</p> <p>c. Variabel dependen: pengungkapan modal intelektual</p>	<p>a. Komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.</p> <p>b. Ukuran dewan komisaris dan konsentrasi kepemilikan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.</p>
2	Chandra (2010)	Untuk melihat pengaruh mekanisme	Analisis regresi berganda	a. Variabel independen: proporsi	a. Struktur kepemilikan berhubungan
		<i>corporate governance</i>		dewan	secara signifikan

		terhadap tingkat pengungkapan <i>intellectual capital</i>		komisaris independen, struktur kepemilikan, ukuran komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit.  b. Variabel dependen: tingkat pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> .	dengan pengungkapan <i>intellectual capital</i>  b. Proporsi dewan komisaris independen, jumlah komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i> .
3	Bukh, <i>et al.</i> (2005)	Meneliti kepemilikan manajerial, jenis industri, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan modal intelektual di Denmark	Analisis regresi	a. Independen: kepemilikan manajerial, jenis industri, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan  b. Dependen: pengungkapan modal intelektual	a. Kepemilikan manajerial dan jenis industri berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual di Denmark  b. Ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
					modal intelektual di Denmark
4	White, <i>et al.</i> (2007)	Meneliti ukuran perusahaan, umur	Analisis Regresi Berganda	a. Independen: ukuran perusahaan, umur	a. Ukuran perusahaan, leverage, dan komisaris

		perusahaan, <i>leverage</i> , konsentrasi kepemilikan, dan komisaris independen terhadap pengungkapan modal intelektual perusahaan bioteknologi Australia		perusahaan, <i>leverage</i> , konsentrasi kepemilikan, dan komisaris independen  b. Dependen: pengungkapan modal intelektual	independen berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual  b. umur perusahaan dan konsentrasi kepemilikan saham tidak berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual
5	Bruggen, <i>et al.</i> (2009)	Meneliti jenis industri, ukuran perusahaan, dan asimetri informasi terhadap pengungkapan modal intelektual di	Analisis regresi OLS	a. Independen: jenis industri, ukuran perusahaan, dan asimetri informasi  b. Dependen: pengungkapan modal	a. Jenis industri dan ukuran perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan modal intelektual
		perusahaan publik Australia		intelektual	b. Asimetri informasi tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan modal intelektual

6	Woodcock dan Rosalind (2009)	Menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual di perusahaan Australia	Analisis regresi berganda	<p>a. Independen: jenis dan tipe auditor, umur perusahaan, <i>leverage</i>, dan konsentrasi kepemilikan</p> <p>b. Dependen: pengungkapan modal intelektual</p>	<p>a. Jenis dan tipe auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual</p> <p>b. Umur perusahaan, <i>leverage</i>, dan konsentrasi kepemilikan saham tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual</p>
7	Fakhilaturan, <i>et al.</i> (2009)	menguji hubungan good corporate	Analisis regresi berganda	a. Independen: ukuran perusahaan,	a. Ukuran perusahaan, komisaris
		governance terhadap pengungkapan modal intelektual pada perusahaan sektor perbankan di Indonesia		<p>komisaris independen, struktur kepemilikan, dan kepemilikan manjerial</p> <p>b. Kontrol: total aset, <i>leverage</i>, ROE, <i>growth</i>, umur perusahaan, dan</p>	<p>independen dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual</p> <p>b. Kepemilikan manajerial merupakan variabel yang</p>

				tipe auditor c. Dependen: pengungkapan modal intelektual	signifikan, akan tetapi memiliki hubungan yang negatif dengan modal internal
8	Wahyu (2009)	Menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan modal intelektual di Indonesia	Analisis regresi berganda	a. Independen: ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan saham, komisaris independen, <i>leverage</i> , dan umur perusahaan  b. Dependen: pengungkapan	a. Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual  b. Konsentrasi kepemilikan saham, komisaris
				modal intelektual	independen, <i>leverage</i> , dan umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual
9	Artinawati (2009)	Menguji pengaruh faktor ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, <i>leverage</i> , kepemilikan	Analisis regresi berganda	a. Independen: ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen, <i>leverage</i> , kepemilikan	a. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , kepemilikan saham, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap

		saham, dan profitabilitas terhadap pengungkapan modal intelektual		saham, dan profitabilitas  b. Dependen: pengungkapan modal intelektual	pengungkapan modal intelektual  b. Umur perusahaan dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual
10	Branco, <i>et al.</i> (2010)	a. Menguji perbandingan penggunaan media internet dengan laporan tahunan sebagai media pengungkapan modal intelektual di perusahaan Portugal  b. Menguji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual di perusahaan Portugal	Analisis non parametik	a. Independen: ukuran perusahaan dan jenis industri  b. Dependen: pengungkapan modal intelektual	a. Penggunaan media internet sebagai media pengungkapan modal intelektual lebih besar dibandingkan dengan media laporan tahunan.  b. Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual  c. Jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual

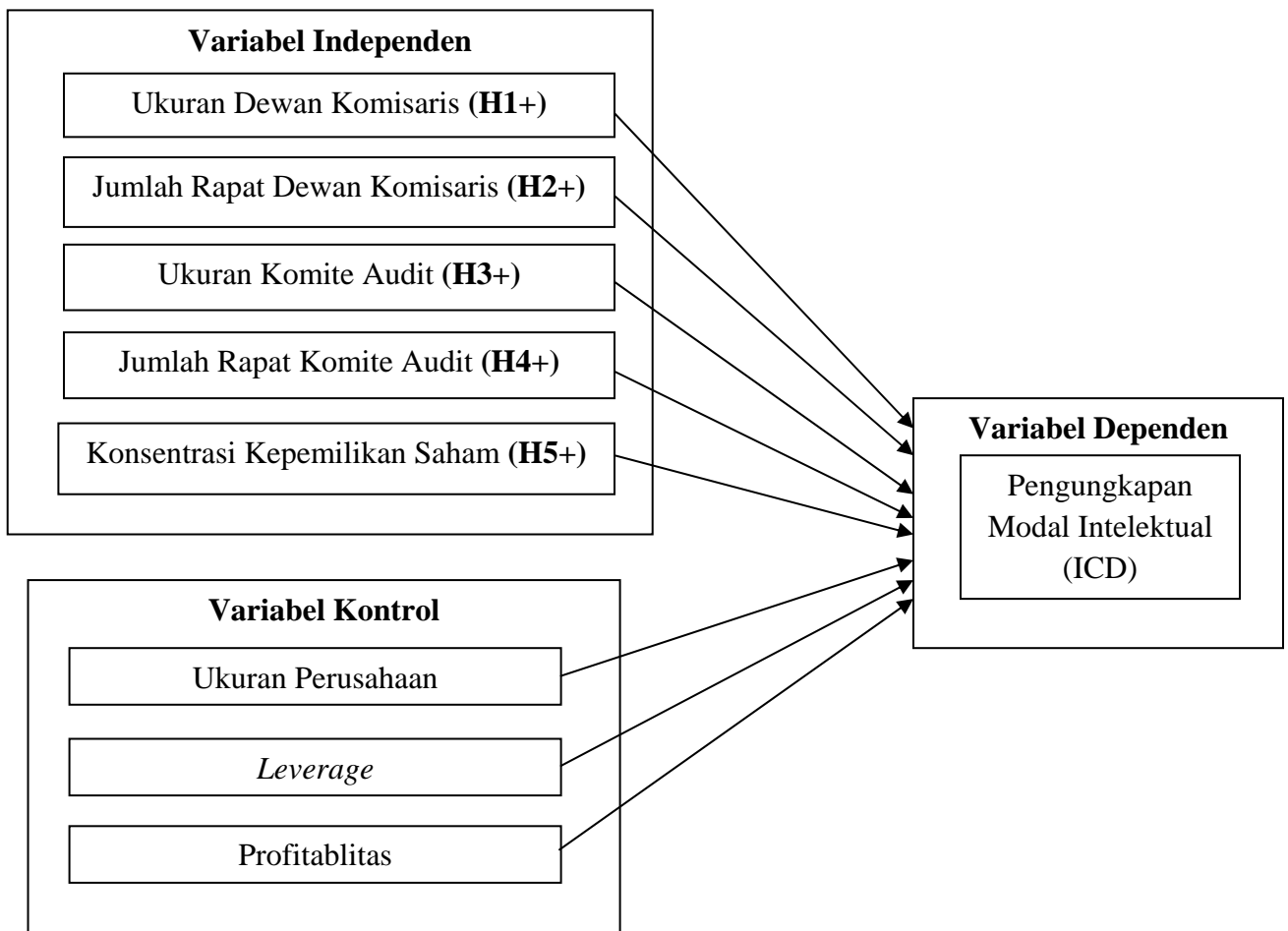
Sumber : Data sekunder yang telah diolah (2011)



### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kesadaran suatu perusahaan pada modal intelektual meningkat seiring pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi, sehingga dianggap penting oleh perusahaan untuk mengungkapkan modal intelektualnya demi memberi informasi positif kepada pihak pemangku kepentingan, menarik minat investor, serta digunakan untuk meningkatkan keunggulan daya saing yang dapat menambah nilai perusahaan. Untuk memahami bagaimana dinamika struktur *corporate governance* dapat mempengaruhi pengungkapan modal intelektual, maka akan disajikan skema kerangka pemikiran yang tersusun pada gambar 2.3.

**Gambar 2.2**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan monitoring terhadap tindakan manajer sehingga kejadian seperti kecurangan dapat dicegah. Tindakan monitoring yang dilakukan dapat mengurangi biaya agensi melalui penekanan bagi manajer untuk melakukan pengungkapan informasi mengenai modal intelektual secara relevan dan akurat. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara pihak agen dengan pihak prinsipal. Dengan semakin besarnya ukuran dewan komisaris suatu perusahaan, maka kinerja pengawasan dan pengendalian menjadi lebih baik dan efektif sehingga akan meningkatkan pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian, hipotesis yang akan dikembangkan yaitu sebagai berikut:

**H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual**

### **2.4.2 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Rapat dewan komisaris merupakan media untuk melakukan koordinasi dengan berbagai dewan komisaris untuk menentukan pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan (Waryanto, 2010). Dalam rapat akan ditetapkan mengenai

efektifitas mekanisme pengawasan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

Dengan sering diadakannya rapat dewan komisaris, diharapkan dapat meningkatkan mekanisme pengawasan dan pengendalian menjadi lebih baik dan lebih efektif. Mekanisme tersebut tentu akan memberi dorongan dan tekanan bagi manajer untuk mengungkapkan informasi mengenai modal intelektual dengan baik dan relevan sehingga akan meningkatkan pengungkapan modal intelektual. Dengan demikian, hipotesis yang akan dikembangkan sebagai berikut:

**H2: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual**

#### **2.4.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen untuk mencegah tindakan kecurangan seperti menyajikan informasi yang tidak akurat dan relevan.

Dengan demikian, semakin besar ukuran komite audit suatu perusahaan maka dapat mempengaruhi pengungkapan informasi yang dilakukan, seperti informasi modal intelektual semakin luas dan berkualitas. Penelitian Sani (2010) menemukan adanya hubungan antara ukuran komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti akan mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual**

**2.4.4 Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Rapat komite audit mengadakan pertemuan dengan berbagai komite audit yang memiliki berbagai macam keahlian. Koordinasi dalam rapat komite audit membahas mengenai strategi dan evaluasi pelaksanaan tugas seperti pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, serta pengawasan terhadap tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan semakin seringnya frekuensi rapat komite audit dilakukan, maka dapat meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih baik dan efektif sehingga dapat mempengaruhi pengungkapan informasi modal intelektual, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Penelitian Sani (2010) menemukan adanya hubungan antara jumlah rapat komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang akan dikembangkan yaitu:

**H4: Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual**

**2.4.5 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Saham terhadap Pengungkapan Modal Intelektual**

Pemegang saham tersebut tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pemegang saham menerapkan strategi yang selanjutnya akan

diimplementasikan dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Tahapan-tahapan tersebut tidak lepas dari peran pemegang saham atau pemilik kekayaan perusahaan. Dengan demikian, dengan adanya peran dan kuasa oleh kepemilikan saham yang terkonsentrasi memberi pengaruh terhadap aktivitas operasi perusahaan, salah satunya tekanan terhadap manajer untuk melakukan pengungkapan modal intelektual.

Penelitian yang dilakukan oleh Woodcook dan Rosalind (2009) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar akan menimbulkan biaya agensi. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham akan mengurangi biaya agensi. Tekanan oleh pemegang saham bagi manajer untuk mengungkapkan informasi, yaitu salah satunya informasi modal intelektual. Selain itu terdapat tindakan pengawasan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan manajer serta untuk mencegah konflik dan asimetri informasi seperti pengurangan informasi dan memberi informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dengan demikian, diharapkan dengan kepemilikan saham yang terkonsentrasi maka akan meningkatkan tindakan pengawasan dan tekanan kepada manajer dalam melakukan pengungkapan informasi modal intelektual. Penelitian yang dilakukan Wahyu (2009) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan saham memiliki pengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti akan mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H5: Konsentrasi kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap pengungkapan modal intelektual.**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

##### 3.1.1 Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan modal intelektual pada laporan tahunan yang dinyatakan dengan ICD *Index* (*Intellectual Capital Disclosure Index*). Metode *content analysis* digunakan untuk mengukur jumlah pengungkapan modal intelektual dengan membaca dan memberi kode informasi yang terkandung di dalamnya menurut kerangka modal intelektual yang dipilih. Apabila item yang ditentukan diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan, maka akan diberi skor 1. Sedangkan, apabila item yang ditentukan tidak diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan, maka akan diberi skor 0.

Penilaian ICD *Index* ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah maksimum pengungkapan modal intelektual yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perhitungan ICD *Index* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ICD\ Index = \sum \frac{di}{M} \times 100\%$$

Keterangan mengenai rumus ICD *Index* tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

ICD *Index* = Indeks Pengungkapan Modal intelektual

di = Jumlah pengungkapan modal intelektual yang telah dilakukan perusahaan

M = Jumlah maksimum pengungkapan modal intelektual yang seharusnya dilakukan perusahaan

Indeks pengungkapan modal intelektual ini menggunakan indeks pengungkapan yang telah dikembangkan oleh Bukh, *et al.* (2005). Pengungkapan modal intelektual diukur melalui enam dimensi yang meliputi karyawan, konsumen, teknologi informasi, proses, penelitian dan pengembangan, serta pernyataan strategi. Berikut ini akan dijabarkan mengenai enam dimensi pengukuran pengungkapan modal intelektual yang berjumlah 78 item menurut Bukh, *et al.* (2005) yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Indeks Pengungkapan Modal Intelektual**

<b>Keterangan</b>	<b>Item</b>	<b>Kode</b>
<i>Employee</i> Karyawan (27 item)	Rincian karyawan berdasarkan umur	E1
	Rincian karyawan berdasarkan senioritas	E2
	Rincian karyawan berdasarkan gender	E3
	Rincian karyawan berdasarkan kebangsaan	E4
	Rincian karyawan berdasarkan departemen	E5
	Rincian karyawan berdasarkan fungsi pekerjaan	E6
	Rincian karyawan berdasarkan pendidikan	E7
	Tingkat perputaran karyawan	E8
	Komentar mengenai perubahan jumlah karyawan	E9
	Komentar mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan	E10
	Tingkat ketidakhadiran karyawan	E11
	Diskusi wawancara karyawan	E12
	Pernyataan kebijakan tentang pengembangan kompetensi	E13
	Deskripsi program dan aktivitas pengembangan kompetensi	E14
	Biaya pendidikan dan pelatihan	E15
	Biaya pendidikan dan pelatihan berdasarkan jumlah karyawan	E16

	Biaya karyawan berdasarkan jumlah karyawan Kebijakan rekrutmen perusahaan Indikasi terpisah perusahaan yang memiliki departemen HRM, divisi atau fungsi Rotasi kesempatan pekerjaan Kesempatan karir Sistem remunerasi dan insentif Pensiun Polis Asuransi Laporan ketergantungan pada personil kunci Pendapatan karyawan Nilai tambah per karyawan	E17 E18  E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27
<i>Customer Pelanggan</i> (14 item)	Jumlah pelanggan Rincian penjualan berdasarkan pelanggan Penjualan tahunan per segmen atau produk Ukuran rata-rata pembelian oleh pelanggan Ketergantungan pada pelanggan utama Deskripsi keterlibatan pelanggan dalam operasi perusahaan Deskripsi hubungan pelanggan Pendidikan atau pelatihan pelanggan Rasio pelanggan untuk karyawan Nilai tambah per pelanggan atau segmen Pangsa pasar absolute perusahaan dalam industri (persen) Pangsa pasar relative perusahaan (tidak dinyatakan dalam persen) Pangsa pasar berdasarkan negara, segmen, produk (persen) <i>Repurchases</i>	C1 C2 C3 C4 C5  C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12  C13 C14
IT Teknologi Informasi (5 item)	Deskripsi investasi TI Deskripsi sistem TI yang ada Aset <i>software</i> yang dimiliki atau dikembangkan perusahaan Deskripsi fasilitas TI Biaya TI	IT 1 IT 2  IT 3 IT 4 IT 5
<i>Processes Proses</i> (8 item)	Informasi dan komunikasi dalam perusahaan Upaya terkait dengan lingkungan kerja Bekerja dari rumah Berbagi pengetahuan dan informasi internal Berbagi pengetahuan dan informasi eksternal Mengukur kegagalan proses internal atau eksternal Diskusi balas jasa dan program sosial perusahaan Persetujuan lingkungan dan pernyataan atau kebijakan	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
<i>Research and Development Penelitian dan</i>	Pernyataan kebijakan, strategi dan tujuan aktivitas R&D Biaya R&D Rasio biaya R&D untuk penjualan	RD1 RD2 RD3



pengembangan (9 item)	R&D yang diinvestasikan dalam penelitian dasar	RD4
	R&D yang diinvestasikan dalam desain dan pengembangan produk	RD5
	Rincian prospek masa depan tentang R&D	RD6
	Rincian paten perusahaan yang ada	RD7
	Jumlah paten, lisensi, dan sebagainya	RD8
	Informasi tentang paten yang tertunda	RD9
<i>Strategic Statements</i> Pernyataan Strategi (15 item)	Deskripsi teknologi produksi baru	SS1
	Pernyataan tentang kinerja kualitas perusahaan	SS2
	Informasi tentang aliansi strategis perusahaan	SS3
	Tujuan dan alasan aliansi strategis	SS4
	Komentar dampak aliansi strategis	SS5
	Deskripsi jaringan pemasok dan distributor	SS6
	Penyataan citra dan merek	SS7
	Pernyataan budaya perusahaan	SS8
	Pernyataan tentang praktik terbaik	SS9
	Struktur organisasi perusahaan	SS10
	Pemanfaatan energi, bahan baku dan bahan input lainnya	SS11
	Investasi di lingkungan	SS12
	Deskripsi keterlibatan karyawan	SS13
	Informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan tujuannya	SS14
	Deskripsi kontrak karyawan atau masalah karyawan	SS15

Sumber : Bukh, et al. (2005)

### 3.1.2 Variabel Bebas (Independen)

#### 3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian internal yang dapat digunakan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak agen dengan pihak prinsipal dengan melakukan pengungkapan informasi mengenai informasi modal intelektual. Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan cara menghitung jumlah dewan komisaris dalam laporan tahunan perusahaan.

#### 3.1.2.2 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Menurut Waryanto (2010), rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan dewan komisaris dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Jumlah rapat dewan komisaris dapat diukur dengan

cara menghitung frekuensi pertemuan dewan komisaris yang ada pada laporan tahunan perusahaan.

#### **3.1.2.3 Ukuran Komite Audit**

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan operasi perusahaan. Ukuran komite audit diukur dengan cara menghitung jumlah komite audit dalam laporan tahunan suatu perusahaan.

#### **3.1.2.4 Jumlah Rapat Komite Audit**

Rapat komite audit digunakan sebagai media dalam melakukan koordinasi dengan komite audit untuk melakukan tugas pelaksanaan dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan. Jumlah rapat komite audit dapat diukur dengan cara menghitung frekuensi rapat komite audit yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan.

#### **3.1.2.5 Konsentrasi Kepemilikan Saham**

Kepemilikan saham yang sebagian besar dimiliki oleh individu atau kelompok akan menyebabkan adanya konsentrasi kepemilikan saham. Konsentrasi kepemilikan saham suatu perusahaan dapat diukur dengan menghitung persentase jumlah saham terbesar yang dimiliki pemegang saham tertinggi.

### **3.1.3 Variabel Kontrol**

Variabel kontrol dalam penelitian ini didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol untuk menetralkan pengaruhnya. Variabel kontrol berfungsi untuk menghilangkan atau menetralkan pengaruh yang dapat mengganggu

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas.

### 3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Perusahaan besar memiliki jumlah pemegang saham yang banyak dan lebih menjadi sorotan di pasar modal, sehingga perusahaan dituntut untuk mengungkapkan informasi untuk memenuhi kebutuhan investor, kreditur, dan sebagainya. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SIZE = \text{Logaritma natural (total aset)}$$

### 3.1.3.2 Leverage Perusahaan

*Leverage* digunakan sebagai alat untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap hutang yang digunakan dalam membiayai operasi perusahaannya. *Leverage* yang tinggi akan menimbulkan resiko perusahaan untuk melanggar perjanjian utang. *Leverage* dapat diukur dengan cara membagi total hutang dengan total ekuitas. Dengan demikian, *leverage* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Leverage = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

### 3.1.3.3 Profitabilitas Perusahaan

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus ROI (*Return on Investment*). ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. Selain itu, dapat digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Rumus ROI akan dijelaskan sebagai berikut :

$$ROI = \frac{\text{Profit after Taxes}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2010. Laporan tahunan periode 2010 dipilih karena dianggap dapat mewakili kondisi yang relatif baru di pasar modal. Selain itu dapat dianggap bahwa perusahaan lebih siap dan mampu untuk melakukan pengungkapan informasi modal intelektualnya dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang relevan untuk menggambarkan kondisi aktual di Indonesia.

Jumlah populasi yang diperoleh sebanyak 74 perusahaan keuangan dari total 409 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Setelah itu akan dilakukan pemilihan sampel dalam penelitian ini. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan informasi dan sesuai dengan kriteria serta pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria sampel akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor keuangan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2010 secara lengkap di Bursa Efek Indonesia.

2. Perusahaan sektor keuangan yang mengungkapkan informasi modal intelektual dalam laporan tahunan pada tahun 2010 di Bursa Efek Indonesia.
3. Perusahaan sektor keuangan yang memiliki data-data yang lengkap terkait dengan variabel penelitian.

Melalui metode tersebut, maka sampel final yang digunakan berjumlah 60 perusahaan keuangan sesuai dengan kriteria di atas.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan keuangan. Laporan tahunan diperoleh dari sumber-sumber yaitu dari situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.com](http://www.idx.com) dan pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan dengan cara mengumpulkan dan meringkas data yang terkait dengan penelitian. Penggunaan data diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada, yaitu data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010. Tahapan selanjutnya dilakukan penelusuran dan pencatatan informasi pada laporan tahunan yang berkaitan dengan penelitian.

Metode *content analysis* digunakan untuk mengukur jumlah pengungkapan modal intelektual dengan membaca dan memberi kode informasi yang terkandung

di dalamnya menurut kerangka modal intelektual yang dipilih. Apabila item yang ditentukan diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan, maka akan diberi skor 1. Sedangkan, apabila item yang ditentukan tidak diungkapkan oleh perusahaan di laporan tahunan, maka akan diberi skor 0.

### **3.5 Metode Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui jumlah indeks pengungkapan modal intelektual perusahaan keuangan yang terdiri dari 78 item. Item-item pengungkapan modal intelektual tersebut terbagi dalam 6 dimensi yang meliputi karyawan, pelanggan, proses, R&D, teknologi informasi, dan pernyataan strategis.

#### **3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat pengungkapan modal intelektual, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, konsentrasi kepemilikan saham, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada perusahaan keuangan yang menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2010 dan terdaftar di BEI. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mean*, standar deviasi, nilai *minimum*, dan nilai *maximum*.

#### **3.5.3 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghindari estimasi yang bias karena tidak semua data dapat diterapkan dengan melakukan

analisis regresi. Dalam penelitian ini menggunakan pengujian yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *cross sectional* dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan *purposive* sampling. Sedangkan, uji autokorelasi hanya tepat digunakan untuk data *time series*.

### **3.5.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov K-S* dan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *normal p-plot of Regression standardized residual* dari variabel independen, dimana:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### **3.5.3.2 Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ).

Nilai *cutoff* yang dipakai untuk menandai adanya faktor-faktor multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0.10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$ . Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinearitas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya.

### 3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *studentized delete residual* nilai tersebut. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot model*. Dasar analisis heteroskedastisitas (Ghozali, 2007) :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam



penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan konsentrasi kepemilikan saham. Sedangkan variabel dependennya adalah indeks pengungkapan modal intelektual. Hubungan antara struktur *corporate governance* terhadap pengungkapan modal intelektual dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ICD\ Index = \beta_0 + \beta_1 UKOM_i + \beta_2 RAKOM_i + \beta_3 UDIT_i + \beta_4 RADIT_i + \beta_5 KONST_i + \beta_6 SIZE_i + \beta_7 LEV_i + \beta_8 ROI_i + \varepsilon_i$$

Keterangan:

ICD *Index* : Indeks Pengungkapan Modal Intelektual

UKOM : Ukuran (jumlah) Dewan Komisaris

RAKOM : Jumlah Rapat Dewan Komisaris

UDIT : Ukuran (jumlah) Komite Audit

RADIT : Jumlah Rapat Komite Audit

KONST : Konsentrasi Kepemilikan Saham (persentase)

SIZE : Ukuran Perusahaan dihitung dengan logaritma natural total aset ( $\ln$  total aset)

LEV : Rasio *Leverage (Debt to Equity Ratio)*

ROI : *Return on Investment*

$\varepsilon_i$  : *Error term*

### 3.5.5 Pengujian hipotesis

#### 3.5.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2007).

#### **3.5.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji Statistik F dilakukan untuk menguji kemampuan seluruh variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi tingkat 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### **3.5.5.3 Uji t (Uji Parsial)**

Menurut Ghozali (2007), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan  $< 0.05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.